

Panjara Jakarta, 23 Juni 1992

TL1552

Kepada : Amnesti Internasional
c/o Mr. Geoff Robinson
di London - UK.

Salam Solidaritas Selalu Demi Hak Asasi Manusia.

Bersama ini kami Putra Timor Leste Yang saat ini mendekam dalam penjara di Jakarta datang kepada Amnesti Internasional untuk menyampaikan salam dan penghargaan kami kepada Mr. Geoff R. beserta seluruh teman sesama members dari Amnesti Internasional yang selama ini tanpa kenal lelah memperjuangkan nasib rakyat Timor Leste akan eksistensinya sebagai suatu bangsa di muka bumi ini.

Selama 16 tahun lebih rakyat Timor Leste dipenjarakan, dibuang ke pulau-pulau lain, dieksekusi, dibantai secara masal, diperkosa, dianiaya dan lain-lain karena rakyat ini bertekad untuk memperjuangkan hak Asasinya/ Hak Kemerdekaannya. Saat ini kekerasan itu merembet juga sampai kepada kami generasi muda Timor Leste yang datang menuntut ilmu di tanah Indonesia. Kami dihadapkan ke Pengadilan Indonesia dan kami dipaksa untuk menerima hukum Indonesia, hukum mana selalu kami dan rakyat kami menentang selama 16 tahun demikian juga sikap dari Perserikatan-Bangsa-Bangsa yang tidak pernah mengakui hukum tersebut. Di pengadilan yang merupakan kaki tangan pemerintah diktator, feodalis ini kami ditekan untuk harus menerima Undang-undang yang direkayasa oleh Indonesia demi konsumsi diplomasinya.

Kepada Amnesti Internasional kami menginformasikan bahwa kami tidak akan menerima hukum dari Indonesia, segala yang kami lakukan demi membela hak rakyat kami adalah juga hak kami dan itu dijamin oleh hukum Internasional berdasarkan pada Piagam PBB dan resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB berkenaan dengan Timor Leste sejak tahun 1975 sampai tahun 1982.

Di Pengadilan kami yang memprotes pembantaian masal tanggal 12 November dijatuhi hukuman yang lebih berat dari pada para tentara yang menembak massa demonstran. Hukuman yang paling berat bagi mereka (tentara pembantai) adalah 18 bulan sedang bagi kami dijatuhi hukuman 5, 6, 10 bulan dan 3, 9, 10 tahun, itupun belum termasuk mereka di Dili yang dituntut hukuman seumur hidup.

Dengan membicarakan masalah hukuman yang dijatuhkan kepada kami dan kepada tentara pembantai ini tidak merupakan suatu keluhan/perbandingan hukuman melainkan kami hanya ingin menyodorkan fakta ini kepada Amnesti Internasional untuk melihat bagaimana penerapan hukum di Indonesia ini. Berbicara mengenai hukuman hanyalah merupakan fakta bagi Amnesti Internasional dan kepada dunia karena sikap kami adalah tidak menerima hukum Indonesia dan segala yang kami lakukan walaupun kami lakukan di wilayah Indonesia tidak pantas kami diadili karena perbuatan kami adalah murni politik tidak ada unsur kriminal.

Dengan proses peradilan yang tidak jujur ini sekali lagi Indonesia
telah

telah menyatakan kepada masyarakat luas bahwa dia (Indonesia) adalah negara yang tidak mengenal adanya hak asasi manusia serta Pengadilanannya adalah alat untuk menindas rakyat.

Karena perbuatan Indonesia yang tidak manusiawi itu maka kami sangat menayangkan sikap dari negara-negara besar yang telah menutup mata terhadap nasib rakyat Timor Leste. Negara-negara besar ini sering memproklamirkan diri sebagai pembela Hak Asasi Manusia dan Penegak Piagam PBB, tetapi pada kenyataannya mereka ini lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan hubungan bilateral dari pada harus memperhatikan nasib suatu masyarakat yang ditindas, dibunuh, hak kebebasannya dicabut selama belasan tahun ini. Seluruh ^{dunia} tahu bahwa Indonesia adalah pembunuh tetapi mereka tetap menyumbangkan senjata kepada Indonesia untuk membunuh rakyat serta menjalankan aktivitasnya yang lain yang sifatnya represip.

Setelah kejadian 12 November 1992 itu ada beberapa negara yang menyempatkan diri untuk membicarakan dan berusaha untuk menekan Indonesia dari segi ekonomi tetapi itu masih hanya terbatas pada kasus pembunuhan di Santa Cruz itu saja, mereka ^{tidak} berusaha untuk melihat pada masalah yang sebenarnya, masalah yang menjadi sebab dari semuanya ini. Dalam esponduk dan pernyataan-pernyataan lain rakyat mengatakan bahwa mereka mau merdeka dan meminta kepada dunia untuk mengatakan kepada Indonesia agar menghormati hak kemerdekaan mereka, tetapi karena kepentingan-kepentingan lain maka negara-negara yang menyempatkan diri untuk membicarakan nasib dari mereka yang terbantai itupun hanya membicarakan sebatas pembantaian itu saja. Yang dituntut oleh rakyat Timor Leste itu sendiri sudah amat jelas di mata masyarakat Internasional yaitu mereka minta uluran tangan dari PBB untuk mengadakan Referendum di Timor Leste.

Saat ini negara-negara besar yang sangat diharapkan uluran tangannya itu sedang sibuk dengan masalah etnis di Yugoslavia, masalah fraksi di Kamboja dengan memberi punggung kepada rakyat Timor Leste yang sebenarnya sedang menghadapi suatu situasi yang lebih kejam dari pada yang dihadapi oleh Yugoslavia, Kamboja, Afganistan dan lain-lain itu.

Persekitatan Bangsa-bangsa sekarang sedang membicarakan resolusi yang dikeluarkan terhadap Israel pada tahun 40-an dan terus mengeluarkan resolusi-resolusi baru untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang timbul tetapi membekukan 10 resolusi yang pernah dileluarkan pada tahun 1975 sampai tahun 1982 berkenaan dengan Timor Leste yang nadanya menuntut Indonesia untuk menarik mundur pasukannya dari Timor Leste dan menghormati hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Leste.

Indonesia sebagai anggota PBB sering mengirim pasukannya untuk bergabung dengan pasukan perdamaian dari negara lain untuk menyelesaikan peperangan seperti di Kamboja, Namibia, Kongo dan lain-lain. Apakah Indonesia telah mampu menutup mata PBB dengan kepatuhannya kepada resolusi Dewan Keamanan PBB. Keaktifan Indonesia dalam mengirim pasukannya seperti sekarang ini pasukan Indonesia yang pertama tiba di Kamboja itu merupakan kedok untuk menutupi aibnya ? Agar dunia melupakan kekejamannya yang dijalankan terhadap rakyat Timor Leste selama 16 tahun ini ?

Mr. G. Robinson beserta seluruh staf Amnesti Internasional yang kami hormati, Rakyat Timor Leste sudah cukup menderita selama 16 tahun lebih, bukan kami tidak mau menderita lagi demi tanah air kami tetapi sebagai manusia sewajarnya kami pun menghendaki suatu akhir dari pada penderitaan ini tanpa harus mengkhianati pertumpahan selama 16 tahun ini, tanpa harus melupakan/menya-nyakan nyawa dari 200.000 lebih yang telah ditumpas oleh Indonesia selama kepengudukannya di Timor Leste.

Yang diharapkan oleh Rakyat Timor Leste sekarang adalah mengadakan suatu referendum di Timor Leste dengan diawasi oleh PBB agar rakyat dengan bebas mengatakan masa depannya.

Kami yang saat ini mendekam dalam penjara mohon kepada Amnesti Internasional agar mengingatkan PBB akan Resolusi-resolusi yang dikeluarkan terhadap masalah Timor Leste, Minim yang kami harapkan adalah agar PBB jangan lupa, tetapi akan lebih baik dan lebih bijaksana kalau PBB mau menuntut Indonesia untuk mematuhi resolusi-resolusi tersebut.

Kalau resolusi-resolusi tersebut sudah dianggap kadaluarsa oleh PBB alternatif lain adalah PBB dan organisasi-organisasi Internasional yang lain harus mau menuntut Indonesia untuk menerima tawaran yang diajukan oleh Utusan Diplomatik dari CNRM (Conselho Nacional da Resistencia Maubere) saudara Jose Ramos Horta ke PBB baru-baru ini. Kiranya itu adalah sikap yang paling lunak dari rakyat Maubere.

Mengenai proses peradilan kami saat ini kami sedang menunggu banding, namun kami tidak mengharapkan sesuatu dari proses banding ini karena kami akan menghadapi hal yang sama seperti yang kami menghadapi di Pengadilan negeri yaitu suatu pengadilan yang tidak jujur. Pada awalnya kami menolak untuk diadili oleh pengadilan Indonesia tetapi karena kami tidak memiliki suatu kekuatan maka akhirnya kami dipaksa juga untuk diadili oleh pengadilan yang sejak awal telah kami ketahui akan ketidakjujurannya.

Oleh karena situasi yang demikian susahnyanya yang sedang kami menghadapi sekarang ini maka kami sangat mengharapkan perhatian dan uluran tangan dari Amnesti Internasional dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Hanya itulah satu-satunya backing kami.

Sikap dari kami 4 orang yang sekarang sedang dalam penjara di Jakarta ini ialah sampai kapan pun kami tetap tidak mengakui hukum Indonesia.

Oleh karena itu maka kami mohon kepada Amnesti Internasional untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi Internasional lainnya untuk mendesak Indonesia agar bebaskan kami baik yang ditahan di Jakarta maupun mereka yang ditahan di Dili tanpa syarat. Indonesia tidak berhak untuk menahan kami karena kasus politik. Disamping kebebasan berpolitik dijamin oleh undang-undang juga kami bukan warga negara Indonesia. Sesuai dengan hukum internasional kami adalah warga negara Portugis.

Hal-hal ini kami sampaikan agar Amnesti Internasional yang selama ini tilak kenal lelah memperjuangkan nasib kami bisa mengetahuinya juga sebagai data untuk mengatur langkah selanjutnya.

Selama kami ditahan sampai saat ini kami sangat mengharapkan agar bisa bertemu dengan Palang Merah Internasional tetapi sampai saat ini tidak pernah.

Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan sekali lagi kepada Amnesti Internasional dan badan-badan lain yang berkompeten bahwa di pengadilan kami tidak minta kepada hakim untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan kepada kami, yang kami perjuangkan adalah bahwa kami tidak bersalah karena sikap kami dilindungi oleh Hukum internasional, kami tidak menerima kehadiran Indonesia di Timor Leste, dasar hukum yang dipegang oleh Jaksa dan Hakim untuk menghukum kami adalah tidak sah. Kami tidak menerima segala peraturan dan segala perundang-undangnya Indonesia karena Integrasi yang dipakai sebagai dasar untuk penyusunan undang-undang yang dikenakan kepada kami selalu dikecam oleh Perserikatan Bangsa-bangsa sejak tahun 1975 hingga sekarang juga sikap rakyat Timor Leste yang menentang kependudukan Indonesia sejak awal kependudukan itu hingga saat sekarang ini.

Oleh karena itu maka kami mohon Amnesti Internasional dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mengambil langkah berdasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB 384 12 Desember 1975 dan resolusi 389 tanggal 22 April 1976 untuk segera menyelesaikan masalah Timor Leste.

Seluruh Staf Amnesti Internasional yang kami hormati, sebagai bangsa yang kecil kami tidak berkekuatan militer untuk menghadapi "macan" dari Asean ini (Indonesia), tetapi dengan perhatian dunia sekarang ini yang terfokus pada hak Asasi Manusia, kami sangat berantusias bahwa dalam waktu dekat dunia akan mengalihkan perhatiannya ke timur untuk mendesak Indonesia agar menarik mundur pasukannya dari Timor Leste dengan demikian kami akan menemukan suatu situasi yang bebas untuk mengatakan Masa Depan Kami.

Kami mohon juga kepada Amnesti Internasional untuk menyampaikan pemikiran kami ini kepada Organisasi-Organisasi lain yang berkompeten yang dapat menyubangkan sesuatu untuk menyelesaikan masalah Timor Leste.

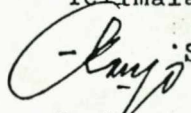
Untuk menghadapi kesusahan yang kami hadapi dalam penjara ini, kami sangat mengharapkan perhatian dan uluran tangan dari Amnesti Internasional.

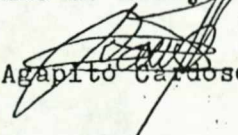
Kalau Amnesti Internasional sudi membalas surat kami ini maka dimohon untuk dialamatkan kepada Penagacara kami dengan alamat Indonesian Legal Aid Foundation, Jln. Diponegoro 74 Jakarta 10320, telepon dan nomor Fax. kami percaya bahwa Amnesti sudah memilikinya.

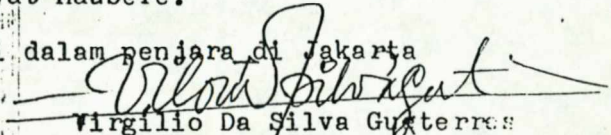
Dengan korespondensi yang kami lakukan dari dalam penjara ini, kami tahu bahwa suatu saat nanti kami akan ditekan oleh para petugas, tidak ada jalan lain bagi kami. Tetap kami percaya bahwa seandainya kami ditekan Amnesti Internasional akan tetap berada di samping kami untuk membela kami.

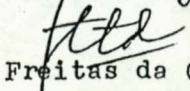
Kiranya hanya beginilah informasi dan permohonan kami pada saat ini. Akhirnya dari penjara kami sampaikan salam hangat disertai Doa semoga Amnesti Internasional tetap jaya untuk memperjuangkan hak Asasi Manusia di muka bumi ini.

Terimalah Salam Hangat Dari Rakyat Maubere.


Fernando de Araújo


Agapito Cardoso


Virgílio Da Silva Guimaraes


João Freitas da Câmara